

## LITERATUR REVIEW: ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT SIPIL MENGGUNAKAN KERANGKA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL ROBIN WAGNER – PAIFICI

Wisnu Setiawan

[wisnusetiawan961@gmail.com](mailto:wisnusetiawan961@gmail.com)

Universitas Gadjah Mada

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena konflik sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, menekankan pentingnya memahami akar penyebab konflik dan menerapkan strategi penyelesaian konflik yang efektif untuk mencapai perdamaian dan kemajuan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menerapkan kerangka resolusi konflik Wagner-Pacifici dalam berbagai studi kasus untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika konflik dan meningkatkan efektivitas upaya resolusi. Metodologi yang digunakan meliputi analisis tinjauan pustaka dengan menggunakan tiga dokumen sebagai sumber data untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka Wagner-Pacifici dapat diterapkan dalam resolusi konflik sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka kerja ini dapat diterapkan dalam konteks konflik sosial yang beragam, dimana kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa memainkan peran penting dalam dinamika konflik dan proses penyelesaiannya. Studi ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan komprehensif yang disesuaikan dengan konteks konflik tertentu dan melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik yang efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan kerangka Wagner-Pacifici memberikan perspektif holistik dalam memahami dan menyelesaikan konflik sosial, serta menawarkan wawasan berharga untuk upaya pembangunan perdamaian.

**Kata Kunci:** Konflik Sosial, Resolusi Konflik, Kerangka Wagner-Pacifici, Studi Kasus.

### PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman nilai, kepentingan, dan sumber daya yang terbatas seringkali menjadi pemicu kemunduran dan pertentangan antara individu, kelompok, atau komunitas (Oberschall, 1978). Mengatasi konflik sosial menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, serta membuka peluang bagi terciptanya perdamaian dan kemajuan bersama. Dengan menghadapi konflik sosial secara konstruktif dan proaktif, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, memperkuat solidaritas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan individu dan kelompok. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai akar penyebab konflik, serta upaya untuk menerapkan strategi resolusi konflik yang efektif dan inklusif, sangat penting untuk mencapai tujuan perdamaian dan kemajuan bersama dalam masyarakat.

Kerangka resolusi konflik sosial yang dikemukakan oleh Robin Wagner-Pacifici menekankan empat aspek penting, yaitu kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa. Dalam konteks kekerasan, kerangka ini memikirkan bagaimana tindakan kekerasan dapat mempengaruhi dinamika konflik dan cara penyelesaiannya. Aspek ruang mengacu pada peran tempat atau lokasi dalam konflik, termasuk bagaimana ruang fisik dapat mempengaruhi interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Waktu menjadi faktor kunci dalam memahami perkembangan konflik, di mana perubahan waktu dapat mempengaruhi intensitas dan arah konflik. Sementara itu, aspek bahasa menyoroti pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik, di mana pemahaman dan interpretasi pesan menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan (Robin Wagner-Pacifici, 2012). Dengan mempertimbangkan keempat aspek ini, kerangka penyelesaian konflik sosial Robin Wagner-Pacifici

memberikan pandangan yang komprehensif terhadap dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya

Tulisan ini bertujuan untuk mengatasi penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Robin Wagner-Pacifci, seorang pakar sosiologi terkemuka di bidang penyelesaian konflik. Melalui tiga analisis studi kasus, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana kerangka kerja Wagner-Pacifci dapat diterapkan dalam berbagai konteks konflik sosial. Selain itu, tulisan ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berperan dalam mencapai resolusi konflik. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendekatan yang ditawarkan oleh Wagner-Pacifci dapat membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi konflik sosial yang kompleks di masyarakat.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian dengan judul Analisis Penyelesaian Konflik Masyarakat Sipil Menggunakan Kerangka Resolusi Konflik Sosial Robin Wagner – Paifici adalah metode tinjauan pustaka. Peneliti menganalisis penyelesaian konflik sosial dengan menerapkan kerangka teoritis Robin Wagner-Pacifci dan menggunakan tiga dokumen sebagai sumber data. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan pencarian, pengumpulan, dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan (Nazir, 2009). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh hasil yang mendalam tentang bagaimana kerangka Wagner-Pacifci dapat diterapkan dalam konteks resolusi konflik sosial berdasarkan analisis tiga dokumen yang dipilih. Tiga studi kasus dipilih untuk mewakili berbagai konteks konflik sosial:

1. Orasi ilmiah. Konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia. (2022) Oleh Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA.
2. Info brief. Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia. (2016) Oleh Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi
3. Buku. Understanding violence in Southeast Asia the contribution of violent incidents monitoring systems. (2026) Oleh Patrick Barron - Anders Engvall - Adrian Morel

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini akan membahas tentang dinamika konflik dan upaya resolusi yang sudah dilakukan dalam setiap kasus, setelah itu akan membahas tentang analisis penerapan kerangka Wagner-Pacifci dalam setiap studi kasus, dengan fokus pada empat aspek kunci.

### **1. Dinamika konflik dan upaya resolusi konflik yang sudah dilakukan dalam setiap kasus**

Dalam jurnal "Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Perkebunan Industri Indonesia" karya Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi, membahas konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia dengan fokus pada kelapa sawit dan kayu (Meri Persch-Orth, 2016). Konflik ini memiliki dampak yang signifikan, termasuk kekerasan dan hilangnya nyawa. Dinamika konflik dimulai dari beberapa penyebab, seperti perampasan lahan, ketidakjelasan tenurial dan hak adat, ketidakadilan dalam pembagian manfaat, kegagalan perusahaan memenuhi janji masyarakat terkait penyediaan lapangan kerja dan infrastruktur pembangunan, serta polusi yang diakibatkan oleh operasional perusahaan yang merugikan masyarakat.

Setelah munculnya penyebab konflik, konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti protes fisik yang dilakukan langsung oleh masyarakat, kampanye melalui media sosial, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh

perusahaan kepada kelompok masyarakat, serta kekerasan baik fisik maupun terhadap properti yang dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan satuan pengamanan. Seiring berlanjutnya konflik antara perusahaan dan masyarakat, berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan. Upaya tersebut antara lain meliputi mediasi yang dilakukan oleh pihak netral, meskipun seringkali mediasi diimplementasikan secara bias oleh kepentingan perusahaan; negosiasi antara masyarakat dan perusahaan; penggunaan jalur hukum untuk menantang legalitas izin konsesi dan menuntut keadilan; serta pengaduan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan melaporkan kepada Compliance Advisor Ombudsman dari International Finance Corporation (CAO IFC).

Dalam jurnal "Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Perdesaan di Indonesia" karya Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kiseng, MA., membahas kompleksitas konflik yang dialami komunitas nelayan di berbagai wilayah perdesaan di Indonesia (Kiseng, 2022). Dinamika konflik dimulai dari beberapa penyebab, seperti ketidakberesan sosial pada level permukaan dan level dasar. Pada tingkat permukaan, ketidakberesan dimulai dari kebijakan yang tidak adil, gangguan wilayah penangkapan, perebutan lahan dan sumber daya, perkembangan pariwisata yang tidak terkendali, dan masuknya perusahaan besar ke wilayah pedesaan. Pada tingkat dasar, terdapat isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan, keadilan, serta martabat. Selain itu, penyebab konflik lainnya termasuk konflik kelas yang disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap alat produksi dan sumber daya, serta perubahan sosial yang dipicu oleh modernisasi alat penangkapan, kebijakan pemerintah, masuknya korporasi, dan pengembangan pariwisata yang kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Perwujudan konflik yang terjadi akibat konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan perdesaan di Indonesia meliputi konflik kekerasan antar kelompok nelayan, konflik hukum yang melibatkan perselisihan antar kelompok nelayan atau dengan perusahaan terkait hak sumber daya dan alat tangkap, serta terbentuknya gerakan sosial oleh nelayan. Untuk proses penyelesaian konflik, dilakukan beberapa pendekatan antara lain pengerahan aparat keamanan, jalur hukum, dialog dan mediasi antara pihak yang berkonflik, pemberdayaan dengan peningkatan kapasitas nelayan, serta pendekatan struktural melalui kebijakan reformasi, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam jurnal "Understanding Violence in Southeast Asia" karya Patrick Barron - Anders Engvall - Adrian Morel, membahas mengenai konflik sub-nasional dan kekerasan di Asia Tenggara, dengan fokus pada tiga studi kasus: Indonesia, Filipina (Bangsamoro), dan Thailand Selatan (Patrick Barron, 2016). Dokumen ini menggunakan data dari sistem pemantauan kejadian kekerasan (VIMS) untuk memahami pola, dampak, dan pemicu konflik. Berikut adalah penjelasan tentang penyebab konflik yang akan dijelaskan pada setiap negara. Di Indonesia, terdapat dua provinsi yang termasuk dalam sistem pemantauan kejadian kekerasan, yaitu Aceh dan Papua. Penyebab konflik di kedua provinsi tersebut disebabkan oleh pemberontakan separatis yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, marginalisasi politik, dan perbedaan budaya dengan pemerintah pusat.

Di daerah Bangsamoro di Filipina, konflik terjadi disebabkan oleh kelompok Muslim di Mindanao, seperti Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang menuntut kemerdekaan. Konflik ini dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, marginalisasi politik, perbedaan agama, dan budaya antara Muslim Moro dan mayoritas Katolik Filipina. Sementara itu, penyebab konflik di daerah Thailand Selatan adalah adanya pemberontakan kelompok separatis Melayu-Muslim seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang juga menuntut kemerdekaan. Konflik ini dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, marginalisasi politik, perbedaan budaya dan agama antara Melayu-Muslim dan mayoritas

Buddha di Thailand, serta kebijakan asimilasi pemerintah Thailand.

Perwujudan konflik yang terjadi di ketiga negara tersebut adalah adanya konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan militer pemerintah, yang menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur. Upaya penyelesaian konflik di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan memberikan otonomi khusus untuk daerah-daerah yang terlibat konflik, meskipun pemerintah Papua menolak tuntutan kemerdekaan. Proses penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki tentang otonomi daerah Aceh dilakukan pada tahun 2005. Di Filipina, upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan memberikan otonomi kepada Bangsamoro, wilayah otonomi baru di Mindanao, namun implementasi tersebut masih menghadapi tantangan. Di Thailand, upaya perundingan damai dilakukan dengan kelompok separatis namun belum mencapai titik kesepakatan yang komprehensif.

## **2. Analisis penerapan kerangka Wagner-Pacifici dalam setiap studi kasus, dengan fokus pada empat aspek kunci**

Analisis penerapan kerangka Wagner-Pacifici dalam setiap studi kasus memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya. Dalam setiap studi kasus, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus dalam menyelesaikan konflik, yaitu kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam konflik berinteraksi, menjelajahi cerita atau narasi yang menjadi latar belakang konflik, mengidentifikasi kepentingan yang saling bertentangan, serta menyusun solusi yang sesuai untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Berikut adalah analisis penerapan kerangka Wagner-Pacifici dalam setiap studi kasus konflik.

a. Berikut analisis aspek kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa dari Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Perkebunan Industri Indonesia oleh Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi

### 1) Kekerasan

Konflik bisa bervariasi dari yang tanpa kekerasan hingga yang berpotensi mematikan, dan keterlibatan aparat keamanan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Ketika menghadapi protes, perusahaan sering kali menggunakan kekerasan atau ancaman untuk meredam protes, sementara masyarakat memilih protes fisik dan media kampanye. Dampak kekerasan ini dapat dirasakan pada tingkat individu, komunitas, dan lingkungan, termasuk korban jiwa, luka-luka, kerusakan properti, trauma psikologis, dan retaknya hubungan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik yang melibatkan kekerasan dan potensi bahaya, diperlukan upaya untuk mencegah eskalasi konflik dengan membangun pemahaman dan kepercayaan antara pihak yang bertikai, serta melibatkan mediator independen jika diperlukan.

### 2) Ruang:

Konflik ini terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Kondisi geografis seperti kepadatan penduduk, keberadaan perkebunan, dan akses ke sumber daya menjadi faktor-faktor dalam dinamika konflik. Konflik sering kali terkait dengan perebutan kontrol atas ruang dan sumber daya. Faktor-faktor spasial, seperti jarak antara para pihak, aksesibilitas lokasi konflik, dan keberadaan infrastruktur, dapat memengaruhi proses resolusi konflik. Oleh karena itu, perlunya analisis spasial untuk mengidentifikasi pola geografis konflik dan faktor-faktor yang berkontribusi, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika konflik.

### 3) Waktu:

Durasi konflik bervariasi. Kerangka Glasl tentang eskalasi konflik dapat digunakan untuk menganalisis tahapan konflik dan mengidentifikasi titik-titik kritis di mana intervensi dapat mencegah eskalasi lebih lanjut. Sebagian besar upaya penyelesaian konflik telah

dilakukan, namun tidak selalu berhasil. Mediasi dan negosiasi merupakan mekanisme penyelesaian yang paling sering digunakan, tetapi sering kali diimplementasikan dengan tidak baik. Oleh karena itu, diperlukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi durasi konflik, seperti kompleksitas isu, kesediaan para pihak untuk bernegosiasi, dan efektivitas mekanisme resolusi. Waktu dapat memengaruhi kesediaan para pihak untuk berkompromi dan mencari resolusi. Sehingga perlu dilakukan analisis bagaimana faktor waktu memengaruhi proses dan hasil resolusi konflik.

#### 4) Bahasa:

Para pihak yang berkonflik sering kali memiliki narasi yang berbeda tentang penyebab, sejarah, dan solusi konflik. Masyarakat cenderung menggunakan strategi publikasi dan media kampanye untuk menarik perhatian, sementara perusahaan lebih memilih pendekatan represif untuk meredam protes. Perbedaan cara menyuarakan konflik ini sering menyebabkan kegagalan komunikasi dan sering kali memperburuk konflik. Oleh sebab itu, diperlukan analisis narasi untuk mengungkap asumsi, nilai, dan kepentingan yang mendasari konflik. Bahasa yang digunakan dalam proses resolusi konflik dapat memengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku para pihak. Perlu memastikan bahasa yang digunakan inklusif, hormat, dan memfasilitasi pemahaman bersama.

b. Berikut analisis aspek kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa dari konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia oleh Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kiseng, MA

##### a) Kekerasan:

Konflik antara nelayan dan masyarakat pedesaan sering kali berakhir dengan kekerasan, bahkan destruktif. Pendekatan keamanan yang bersifat represif cenderung tidak efektif dan justru dapat menegangkan situasi. Teori Imagine Deprivation menjelaskan bahwa persepsi ancaman terhadap penghidupan, meskipun belum tentu nyata, dapat memicu konflik dan kekerasan. Ketakutan akan hilangnya akses terhadap sumber daya, seperti wilayah penangkapan bagi nelayan atau lahan bagi petani, seringkali mendorong tindakan pre-emptive yang berakhir pada kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan solusi penyelesaian konflik yang mengutamakan transformasi konflik dan membangun perdamaian. Menyelesaikan konflik dengan menjamin penghidupan, mendorong keadilan sosial, dan menghormati martabat manusia menjadi hal yang lebih esensial. Memiliki dialog, mediasi, dan pendekatan berbasis kemanusiaan menjadi kunci untuk membangun perdamaian dan mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di komunitas nelayan dan masyarakat pedesaan di Indonesia.

##### b) Ruang:

Konflik sering terjadi akibat persaingan dalam pemanfaatan ruang, baik itu untuk wilayah penangkapan ikan maupun lahan. Perkembangan pariwisata dan penetrasi perusahaan korporat juga sering menjadi pemicu konflik terkait ruang. Menciptakan ruang dialog dan komunikasi antara kelompok yang terlibat dalam konflik sangatlah penting. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus melibatkan proses negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan terkait pembagian ruang. Perencanaan tata ruang yang melibatkan partisipasi dan inklusi dari semua pihak juga sangat diperlukan untuk menjelaskan berbagai kepentingan. Melibatkan forum-forum multipihak dan mekanisme penyelesaian alternatif juga penting untuk menangani konflik yang beragam.

##### c) Waktu:

Konflik akhir merupakan hasil dari akumulasi masalah yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Proses penyelesaian konflik yang berlarut-larut memerlukan waktu dan kesabaran. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi akar permasalahan dan tidak hanya

fokus pada gejala yang terlihat. Penyelesaian konflik harus memperbaiki dinamika perubahan sosial dan mencari solusi yang responsif. Membangun kepercayaan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat juga merupakan hal yang krusial. Selain itu, diperlukan upaya pemulihan pasca konflik untuk memperbaiki hubungan sosial, memulihkan kepercayaan, dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.

d) Bahasa:

Perbedaan bahasa dan budaya antara komunitas atau kelompok nelayan sering menjadi penghalang dalam penyelesaian konflik. Narasi konflik dalam Imagined deprivation theory akhirnya membentuk prasangka dan stereotip. Peran media dan teknologi informasi dalam melaporkan konflik juga dapat memperkuat ketegangan dan menghambat proses penyelesaian. Oleh karena itu, penting untuk membangun narasi bersama yang lebih objektif, mengakui penderitaan semua pihak yang terlibat, dan fokus pada upaya mencapai solusi damai.

c. Berikut analisis aspek kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa dari jurnal "Understanding Violence in Southeast Asia" karya Patrick Barron - Anders Engvall - Adrian Morel.

a) Kekerasan:

Jenis kekerasan dalam konflik bervariasi mulai dari pergerakan separatis bersenjata (seperti di Aceh, Papua, dan Thailand Selatan) hingga konflik horizontal seperti pertikaian antar klan (seperti di Filipina). Berdasarkan data VIMS, intensitas konflik cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu, dengan adanya periode konflik aktif dan periode pasca-konflik. Dampak dari konflik tersebut meliputi korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam konflik, seperti kelompok separatis, aparat militer, dan masyarakat sipil, guna memahami dinamika konflik dan merancang strategi penyelesaian yang sesuai dan efektif..

b) Ruang

Berdasarkan data VIMS, kekerasan dalam konflik cenderung terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya saja di Papua, kekerasan banyak terjadi di beberapa distrik tertentu. Selain itu, faktor-faktor geografis seperti tingkat aksesibilitas, keberlimpahan sumber daya alam, dan batas wilayah juga berperan dalam membentuk dinamika konflik serta upaya penyelesaiannya. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengidentifikasi pola konflik dan merancang strategi penyelesaian yang efektif..

c) Waktu:

Pemahaman terhadap sejarah dan perkembangan konflik dari masa ke masa memiliki nilai yang sangat penting. Data VIMS menunjukkan bagaimana dinamika konflik di Aceh mengalami perubahan dari tingkat kekerasan yang tinggi menuju perdamaian yang relatif stabil, sementara konflik di Papua dan Thailand Selatan terus berlanjut tanpa henti. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi periode krusial dalam konflik tersebut. Tindakan ini dapat membantu dalam mendeteksi potensi eskalasi kekerasan yang dapat terjadi dan merancang intervensi yang tepat waktu.

d) Bahasa

Pentingnya memahami sudut pandang konflik dari berbagai pihak, termasuk kelompok separatis, pemerintah, dan masyarakat sipil, krusial untuk meredakan perbedaan dan menciptakan ruang dialog yang harmonis. Pengembangan bahasa perdamaian yang inklusif dan memperhatikan sensitivitas terhadap identitas budaya serta sejarah konflik dapat membantu memperlancar proses rekonsiliasi dan memperkuat kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya kolaboratif dan pemahaman yang mendalam dalam membangun jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa framework Wagner-Pacifici dapat diterapkan dalam berbagai konteks konflik sosial. Keempat aspek yang diidentifikasi oleh Wagner-Pacifici – kekerasan, ruang, waktu, dan bahasa memiliki peran dalam dinamika konflik dan proses penyelesaian. Studi kasus Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Perkebunan Industri Indonesia menunjukkan bagaimana kekerasan yang meluas dapat menghambat proses penyelesaian konflik, sementara studi kasus konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan perdesaan di Indonesia menunjukkan bagaimana ruang fisik dan simbolik dapat digunakan untuk membangun narasi konflik dan memfasilitasi dialog. Studi kasus konflik sub-nasional pada *Understanding Violence in Southeast Asia* menunjukkan bagaimana kekerasan yang meluas dan fluktuatif dapat menghambat proses penyelesaian konflik dan bahasa dapat digunakan untuk membangun ekosistem dan memobilisasi dukungan publik untuk menyelesaikan konflik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa framework Wagner-Pacifici merupakan alat yang berharga untuk memahami dan menganalisis resolusi konflik sosial. Kerangka ini menekankan pentingnya memahami konflik sebagai sebuah proses yang dinamis dan kompleks, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada tercapainya resolusi konflik. Penelitian ini juga menyoroti bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua konflik. Menyelesaikan konflik secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan konteks konflik spesifik, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses dialog dan negosiasi. Dengan demikian, penggunaan framework Wagner-Pacifici dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan holistik dalam memahami serta menyelesaikan konflik sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Danial, W. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Nasional.
- Hall, R. W.-P. (2012). *Resolution of Social Conflict*. Department of Sociology, The New School for Social Research, New York, 38:1, 81-99. doi:10.1146/annurev-soc-081309-150110
- Kiseng, R. A. (2022, Februari 26). *Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Perdesaan di Indonesia*. Orasi Ilmiah Guru Besar.
- Meri Persch-Orth, E. M. (2016, Juni). *Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), p. 143.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. (R. Sikumbang, Ed.) Boogor: Ghalia Indonesia.
- Oberschall, A. (1978). *Theories of social conflict*. *Annual review of sociology*, 4:1, 291-315.
- Patrick Barron, A. E. (2016). *THE CONTRIBUTION OF VIOLENT INCIDENTS MONITORING SYSTEMS*. In T. A. Fondation, *UNDERSTANDING VIOLENCE IN SOUTHEAST ASIA* (pp. 8-68). Uni: Creative Commons Attribution 3.0 IGO .
- Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M. (2022, Februari 26). *Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Perdesaan di Indonesia*. Orasi Ilmiah Guru Besar.
- Robin Wagner-Pacifici, M. H. (2012). *Resolution of Social Conflict*. Department of Sociology, The New School for Social Research, New York, NY 10003, 38:1, 81-99. doi:10.1146/annurev-soc-081309-150110